

## PROPOSAL KEGIATAN

### “MENGKAJI RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA” BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM PERIODE 2021 – 2022



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA  
SURABAYA  
2022



**LEMBAR PENGESAHAN**

Mengesahkan dan menyetujui **MENGENAL RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA** yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya pada :

Hari : Sabtu  
Tanggal : 2 Juli 2022  
Tempat : Online Zoom Meeting Bagi Peserta dan Panitia Lainnya  
Dana Progiat : Rp. 1.000.000,-

Gubernur BEM Fakultas Hukum  
  
**Ade Bayu Haktim**  
NPM. 20.041.043

Surabaya, 23 Juni 2022

Ketua Pelaksana  
  
**Alvin Pratomo**  
NPM. 21.041.011

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Wijaya Putra Surabaya  
  
**Dr. Andy Usman Wijaya, S.H., M.H**  
NIDN. 072.312.750.2


Mengetahui,

Wakil Presiden Mahasiswa  
Universitas Wijaya Putra Surabaya  
  
**Sindy Azzeti Oktaviany**  
NPM. 19.041.018

Wakil Rektor I Bidang Kemahasiswaan  
Universitas Wijaya Putra Surabaya  
  
**Dr. Taufiqurrahman, S.H., M.Hum** †  
NIDN. 070.912.630.1

Menyetujui,

Kabiro Kemahasiswaan  
Universitas Wijaya Putra Surabaya  
  
**Mulya Nurharto, S.Sos., M.Si**  
NIDN. 07.703.670.1

Wakil-Rektor II Bidang PSDM  
Universitas Wijaya Putra Surabaya  
  
**Dr. Esa Wahyu Endarti, S.H., M.Si** †  
NIDN. 072.102.660.1



## I. LATAR BELAKANG

Pada bulan Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia, pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2019 telah menyatakan pemindahan Ibu kota Republik Indonesia serta meminta izin kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Rencana pemindahan ibu kota tersebut telah melalui kajian dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas RI). Presiden menekankan bahwa ibu kota baru tersebut nantinya tak hanya berarti sebagai simbol identitas bangsa, tapi juga sebagai representasi kemajuan bangsa. Letak ibu kota baru yang berada di tengah Indonesia diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi serta pembangunan. Dan pada Senin, 26 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia dalam keterangannya, telah memutuskan sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia. Dan pada Oktober 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membuat sayembara desain Ibu kota Indonesia skala nasional yang terbuka untuk umum.

Di Indonesia, Kedudukan Ibu kota Negara tidak ditetapkan dalam Konstitusi, melainkan dalam Undang-Undang. Dalam Konstitusi, frasa ibu kota hanya disebutkan 2 (dua) kali yakni pada Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat di Pasal 2 yang berbunyi, "Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara." Dan pada Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan di Pasal 23G yang berbunyi, "Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi." Jakarta ditetapkan sebagai Daerah Khusus Ibu kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Jakarta ditetapkan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Akan tetapi, dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan mengenai mekanisme pemindahan ibu kota.



Permasalahan yang timbul berkaitan dengan pemindahan ibu kota di Indonesia salah satunya adalah tidak ada definisi jelas mengenai ibu kota itu sendiri. Apakah ibu kota sebatas simbol negara, pusat kedudukan eksekutif atau pusat pemerintahan secara keseluruhan. Selain itu, terdapat 3 (tiga) permasalahan hukum lainnya. Pertama adalah secara konstitusional, tidak adanya peraturan yang mengatur mekanisme pemindahan ibu kota Republik Indonesia dalam konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua adalah penetapan lokasi baru ibu kota Republik Indonesia mendahului pembentukan dasar hukumnya. Ketiga adalah minimnya unsur pelibatan dari cabang kekuasaan lain, khususnya dari Legislatif berkaitan dengan pemindahan ibu kota tersebut. Bila dilihat dari runtutan perkembangan wacana pemindahan ibu kota saat ini, tampak cabang kekuasaan Eksekutif lah yang paling dominan dalam rencana tersebut.

Dalam hal tersebut, Presiden melalui Bappenas lebih dahulu mengkaji hingga menetapkan lokasi ibu kota baru yang akan datang tanpa melibatkan unsur legislatif, baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Padahal pemindahan ibu kota akan berdampak terhadap seluruh lembaga negara di Indonesia, dikarenakan dalam peraturan berbagai lembaga negara di Indonesia dinyatakan bahwa kedudukan lembaga tersebut berada di Ibu kota Negara. Oleh sebab itu, pemindahan ibu kota akan berdampak terhadap kedudukan berbagai lembaga negara. Di sisi lain, penetapan pemindahan ibu kota dilakukan sebelum adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Sehingga juga dipertanyakan bagaimana kelanjutan pemindahan ibu kota pasca adanya kedaruratan kesehatan dan pelemahan perekonomian nasional akibat adanya pandemi COVID-19 di Indonesia.

## **II. DASAR PEMIKIRAN**

- a) Undang- Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Nasional
- b) Peraturan Pemerintah Indonesia No.60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
- c) Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
- d) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30/U/1998 Tentang Pedoman Utama Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi



### **III. TUJUAN KEGIATAN**

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai konsep negara hukum Indonesia.
2. Sarana mencari dan menciptakan kaderisasi yang unggul, berkualitas, serta dapat bertanggungjawab terutama pada masa Pandemi.
3. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar bagi mahasiswa
4. Menumbuhkan motivasi dalam keaktifan perkuliahan dan penyelesaian suatu masalah

### **IV. SASARAN**

Kegiatan WEBINAR 2022 diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas Wijaya Putra

### **V. INDIKATOR PENCAPAIAN**

1. Mengembangkan pemikiran mahasiswa untuk berpikir kritis dari isu terkini di Indonesia, salah satunya adalah pemindahan Ibu Kota Negara.
2. Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai konsep negara hukum Indonesia.

### **VI. NAMA DAN TEMA KEGIATAN**

- a. Nama Kegiatan : “ MENGKAJI RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA ”
- b. Tema Kegiatan : “ PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA ”

### **VII. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

Hari : Sabtu

Tanggal : 2 Juli 2022

Jam : 09.00 - Selesai

Tempat : Online *Zoom Meeting* Bagi Peserta dan Panitia Lainnya

### **VIII. Susunan Panitia**

(Terlampir)

### **IX. Susunan Acara**

(Terlampir)

### **IX Rencana Anggaran Biaya**

(Terlampir)



## **X Penutup**

Demikian proposal ini kami sampaikan, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kami harapkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga terselenggaranya acara ini. Kami sadar bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu maka segala kritik dan saran sangat kami perlukan demi evaluasi di masa mendatang. Semoga acara ini mendapatkan ridho Allah SWT. Aamiin



**SUSUNAN KEPANTIAAN  
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

**PELINDUNG**

Rektor Universitas Wijaya Putra Surabaya : Dr. Budi Endarto. SH., M.Hum

**PENASEHAT**

Wakil Rektor I : Dr. Taufiqurrahman. SH., M.Hum

Wakil Rektor II : Dr. Esa Wahyu Endarti. SH.,M.Si

**PEMBINA**

Kabiro Kemahasiswaan : Mulus Sugiharto, S.Sos, M.Si

Dekan Fakultas Hukum : Dr. Andy Usmina Wijaya, S.H.,M.H.

**PENANGGUNG JAWAB**

Presiden Mahasiswa BEM-UWP : Saiful 18.012.004

Gubernur BEM Fakultas Hukum : Ade Bayhaqi Hakim 20.041.043

**PANITIA PELAKSANA**

**Ketua Pelaksana** : Alvian Tri Ramadhan 21.041.011

**Sekretaris** : Fernanda Amelia 21.041.008

**Bendahara** : Azzamul Abid 21.041.004

**Sie. Acara** : Rita Yuli Anggraini 21.041.015

: Imam Alamudin 21.041.003

: Ega Ikrar Manggala P 20.041.011

**Sie. HUMAS** : Maulana Fajar Fadillah 21.041.020

: M. Nabil Naufal 21.041.012

**Sie. Perlengkapan** : Mishbahul Ummah A.G 20.041.014

: Fuad hasan 20.041.001

**Sie. Konsumsi** : Ade Ahmad Aly Dany 21.041.021

: Mutia Ayu Wulandari 21.041.007

: Yogie Giant Saputra 20.041.015

**Sie. Dokumentasi** : M. Yahzar Rayhan A 20.041.007

: Aditya Dwi Ramadani 20.041.031



**SUSUNAN ACARA  
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

**A. WEBINAR HUKUM PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA**

Sabtu, 2 Juli 2022

<b>Waktu</b>	<b>Kegiatan/materi</b>	<b>Durasi</b>	<b>PIC</b>	<b>Tempat</b>
08.40 – 09.00	Registrasi Peserta	20 Menit	Panitia	<i>Zoom</i>
09.00 - 09.05	Pembukaan Moderator	5 Menit	Panitia	<i>Zoom</i>
09.05 – 09.15	Pemutaran Video Indonesia Raya dan Hymne Wijaya Putra	10 Menit	Sie Acara	<i>Zoom</i>
09.15 -09.25	Sambutan oleh Dekan Fakultas Hukum	10 Menit	Dr. Andy Usmina Wijaya, S.H., M.H	<i>Zoom</i>
09.25 – 09.30	Sambutan oleh Gubernur Fakultas Hukum	5 Menit	Gubernur BEM FH UWP 20/21	<i>Zoom</i>
09.30 – 09.35	Sambutan oleh Ketua Pelaksana	5 Menit	Ketua pelaksana	<i>Zoom</i>
09.35 – 09.55	Pemateri 1	20 Menit	Fikri Hadi, S.H, M.H	<i>Zoom</i>
09.55 – 10.05	Tanya jawab	10 Menit	Panitia	<i>Zoom</i>
10.05 – 10.25	Pemateri 2	20 Menit	Dr. Suwarno Abadi, S.H, M.Si	<i>Zoom</i>
10.25 – 10.35	Tanya Jawab dan Pemberian Pulsa Doorprize	10 Menit	Panitia	<i>Zoom</i>
10.35 – 10.40	Penutupan	5 Menit	MC	<i>Zoom</i>



**RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN  
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

<b>PEMASUKAN</b>	
A. Dana Progiat	Rp. 1.000.000,-
B. Dana Fakultas	Ro. 200.000,-
<b>TOTAL PEMASUKAN</b>	<b>Rp. 1.200.000,-</b>

<b>PENGELUARAN</b>	
<b>A. KESEKRETARIATAN</b>	
1. PembuatanProposal	Rp. 50.000,-
2. PembuatanLPJ	Rp. 50.000,-
3. Penggandaan	Rp. 75.000,-
4. Surat menyurat, form, dll	Rp. 50.000,-
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 225.000,-</b>
<b>B. KONSUMSI</b>	
1. Makan Panitia ( 35 x 21.000 )	Rp. 735.000,-
2. Air Mineral Gelas ( 2 x 25.000 )	Rp. 50.000,-
3. Snack	Rp. 50.000,-
4. Alat Makan Plastik	Rp. 20.000,-
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 855.000,-</b>
<b>D. LAIN-LAIN</b>	
1. Zoom Premium	Rp. 30.000,-
2. Pulsa Doorprice ( 3 x Rp. 30.000 )	Rp. 90.000,-
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 120.000,-</b>
<b>TOTAL PENGELUARAN</b>	<b>Rp. 1.200.000,-</b>
<b>SISA DANA</b>	<b>Rp. 0,-</b>



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA / UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
BEM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**  
Email : [bemfh@uwp.ac.id](mailto:bemfh@uwp.ac.id)

---

